



MANIS: JURNAL MANAJEMEN, INOVASI BISNIS DAN STRATEGI

Homepage: www.jurnal.usk.ac.id/manis

Vol. 2 No. 2, Desember (2024)

Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 – 2021

Ikhsanul Ilham¹⁾, Suparno Suparno²⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

e-mail: suparno.feakt@usk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga 2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh pada periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa otonomi keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk tugas-tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan secara konsisten rendah setiap tahunnya. Pemerintah pusat terus memegang peran yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk tugas-tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan jika dibandingkan dengan peran pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, Kemandirian Keuangans.

Analysis of Local Own-Resource Revenue Performance in the Regency/City Governments of Aceh Province for the Fiscal Year 2017 – 2021

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Local Own-Resource Revenue in Aceh Province during the fiscal years 2017-2021. The population includes the Financial Reports of Local Governments in the Aceh Province from 2017 to 2021. The data utilized is secondary data extracted from the Financial Reports of Local Governments in the Aceh Province for the period 2017-2021. The research employs a descriptive method with a qualitative approach for data analysis. The results reveal that the financial autonomy of all local government the Aceh Province in meeting the financing needs for governmental tasks, services, and development is consistently low each year. The central government continues to have a more dominant role in fulfilling the financing requirements for governmental tasks, services, and development compared to the role of Local government in the Aceh Province. The findings of this research are anticipated to offer insights and considerations for local governments in formulating policies for managing the Aceh Regional Revenue and Expenditure Budget (APBA).

Keywords: Local Own-Resource Revenue, Local Governments in the Aceh Province, Financial Independence.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menciptakan kesempatan penting untuk pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan peluang pertumbuhan kekayaan daerah, baik berupa sumber daya manusia, alam, maupun lainnya. Penerapan regulasi ini dilakukan dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berupa wewenang luas terhadap pengelolaan keuangan serta pembangunan daerahnya. Melalui pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan mereka secara mandiri, sehingga masing-masing daerah dapat dengan efektif mengelola dana masyarakat guna memaksimalkan pendapatan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan agar seluruh daerah yang diberikan kewenangan mampu mengelola dan membangun pemerintahan secara mandiri dengan mengacu kepada APBD (Rahayu, 2016).

Horas Maurits Panjaitan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) menyampaikan bahwa hanya tujuh pemerintah daerah di Provinsi Aceh yang memiliki realisasi pendapatan melampaui 32,25 persen rata-rata nasional (Diskominfo, 2022). Berikut data persentase realisasi pendapatan masing-masing daerah tersebut.

Tabel 1. Daerah Dengan Realisasi Pendapatan di atas Rata-Rata Nasional

No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan (%)
1	Aceh Tengah	37,21
2	Aceh Selatan	37,20
3	Lhokseumawe	35,85
4	Aceh Besar	34,96
5	Aceh Jaya	34,07
6	Langsa	33,19
7	Banda Aceh	32,65

(Sumber: BPK Aceh, 2021)

Menurut Iqbal Rokan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh pada tahun 2022, anggaran memiliki risiko defisit dengan estimasi 202 miliar rupiah lebih dengan asumsi setiap program dan kegiatan terlaksana. Beliau juga mengungkapkan bahwa risiko tersebut bisa jadi lebih besar jika dijumlahkan dengan sisa utang tahun 2021 dengan jumlah 23 miliar rupiah, sehingga melampaui 225 miliar rupiah. (Diskominfo Banda Aceh, 2022).

Selain Kota Banda Aceh, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Besar juga dinilai masih rendah, ini terlihat dari 15 OPD yang ada hanya 1 OPD yang berhasil melampaui target realisasi PAD, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pencapaian sekitar 1,4 miliar rupiah atau 157,77 persen dari target sekitar 800 juta rupiah, sementara 14 OPD lainnya hingga akhir Agustus 2021 realisasi PADnya kurang dari 50 persen (Serambinews, 2021). Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dimana realisasi penerimaan PAD juga masih rendah, terhitung sejak triwulan pertama hingga triwulan ketiga tahun 2021 realisasi PAD sekitar 66,80 persen atau sekitar Rp55,683 miliar dari target Rp 83,358 miliar (antaranews, 2017).

Di samping itu dalam penilaian kinerja PAD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan bahwa dari keseluruhan provinsi di Indonesia, Provinsi Aceh berada pada peringkat 29, yaitu peringkat kelima terbawah berkaitan dengan kemandirian daerah, hal ini menunjukkan

Provinsi Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten/kotanya dinilai kurang optimal dalam hal pencapaian kinerja penerimaan daerah, dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota yang ada di Provinsi Aceh, hampir keseluruhan pendanaanya tergantung pada pemerintah pusat (Zulkarnain, 2017).

Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwa kabupaten dan kota pada Provinsi Aceh memiliki kinerja pengelolaan PAD yang rendah sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan PAD tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun Anggaran 2017-2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam menentukan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD tersusun dari jumlah akumulatif pos pendapatan yang diterima yang komposisinya meliputi pajak dan retribusi daerah, pos pendapatan selain pajak, seperti hasil BUMD yang diterima, hasil investasi yang diterima, dan sumber daya alam yang dikelola (Bastian, 2002). Halim (2007:87) mendefinisikan PAD sebagai apapun yang diterima oleh daerah yang perolehannya bersumber dari wilayah masing-masing serta kolektivitasnya mengacu pada Perda yang telah diimplementasikan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan tujuan PAD adalah untuk melimpahkan kewajiban bagi Pemda untuk membiayai terlaksananya otonomi daerah yang selaras dengan peluang daerah dalam mewujudkan desentralisasi.

Dengan demikian, PAD berperan sebagai faktor utama dalam menghasilkan pendapatan daerah dan tujuan utamanya adalah untuk terlaksananya pengembangan daerah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi khalayak umum. Hal ini berarti perolehan PAD yang tinggi mengarah kepada pembangunan yang semakin pesat. APBD menganggarkan pendapatan daerah yang dianggap sebagai estimasi penerimaan yang secara rasional diukur dan menggunakan suatu dasar hukum yang pasti.

Kinerja PAD adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai fleksibilitas dalam menggunakan dana keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Maemunah, 2020).

Kinerja PAD dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditentukan (Mariani, 2013).

Menurut (Mardiasmo, 2018:15) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi yang diperkuat dengan menetapkan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment system*).

Pengukuran kinerja PAD digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai (realisasi) dengan yang direncanakan (anggaran). Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Salah satu faktor kunci suksesnya suatu organisasi adalah memiliki sistem pengukuran kerja yang andal (Mardiasmo, 2018:151).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012:212)

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2012:230). Kinerja keuangan daerah atau kapasitas daerah merupakan metrik yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencapai pemerintahan sendiri daerah. Ukuran kinerja berupa komponen – komponen PAD unsur-unsur laporan pertanggungjawaban pengelola kawasan dalam bentuk perhitungan APBD (Halim, 2012: 212).

Menurut Halim (2012), rasio mandiri menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan luar (terutama pemerintah pusat dan provinsi). Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Angka Kemandirian, semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Pokok Daerah (PPD). Semakin banyak pajak yang dibayarkan masyarakat di daerah pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan yang Dihasilkan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001 (dalam Novira Sartika, 2019)

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir dalam Prastowo (2011: 186), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Studi deskriptif merupakan studi untuk mengumpulkan data dan mendeskripsikan kejadian atau objek yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2013:98). Data yang digunakan di gunakan pada penelitian ini adalah kinerja pendapatan asli daerah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2017–2021 Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2017-2021.

Operasionalisasi variabel, yaitu tingkat kemandirian keuangan suatu daerah yang merupakan indikator kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri operasional, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dibutuhkan. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2017 sampai tahun 2021.
2. Mentabulasi dan memilah Data yang telah didapatkan.
3. Menghitung kinerja Pendapatan Asli Daerah secara terperinci dilihat dari kenaikan dan atau penurunannya secara menggunakan rasio kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Barat

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Barat

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	161.742.858.643	150.499.049.235	153.799.291.478	149.925.456.946	134.641.234.284
Total Pendapatan	1.364.767.898.288	1.250.681.695.136	1.399.139.190.532	1.327.545.973.658	1.340.508.333.454

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 dari yang sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp 161.742.858.643 menjadi Rp 150.499.049.235, hal ini disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos pendapatan pajak daerah, khususnya pada bagian penerimaan Pajak BPHTB. Sedangkan pada tahun 2020, penurunan jumlah PAD terjadi dikarenakan adanya penurunan signifikan yang berasal dari pos lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk tahun 2021, penurunan jumlah PAD disebabkan karena sepanjang tahun 2021 masih dilanda pandemi Covid-19 sehingga pemerintah lebih selektif dalam memberikan izin terhadap penyelenggaraan hiburan-hiburan untuk menghindari terjadinya kerumunan dan berdampak terhadap penurunan pendapatan pajak daerah, diantaranya yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 12,03%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 11,24%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya. Menurut Halim (2002), tingkat presentase yang diperoleh dikatakan baik apabila mencapai angka 50 hingga 100 persen. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat masih memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan peran dari daerah Kabupaten Aceh Barat itu sendiri.

Kabupaten Aceh Barat Daya

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	91.571.494.831	83.468.426.211	90.348.940.272	111.763.379.942	91.756.420.320
Total Pendapatan	977.213.097.998	881.628.352.503	989.318.725.965	939.337.945.693	902.359.159.815

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah, khususnya pada Pendapatan Dana Operasional Sekolah (BOS) karena sudah dipindahkan ke Pendapatan Hibah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Penurunan yang terjadi pada PAD 2021 dikarenakan “Lain-lain PAD yang sah” mengalami penurunan pada pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp. 12.337.906.593-, hal tersebut sangat berdampak signifikan terhadap penurunan.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 11,89%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 10%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Besar

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 5. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Besar

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	62.041.880.229	77.909.691.032	169.896.999.689	188.775.264.132	168.823.930.632
Total Pendapatan	1.790.273.242.382	1.656.015.492.256	1.833.486.345.198	1.879.904.774.163	1.827.341.049.370

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pendapatan pajak merupakan faktor yang menjadikan PAD Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 mengalami penurunan yang berdampak akibat pandemi Covid-19, hal ini dapat dilihat dari penurunan pendapatan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, setelah diterapkannya pembatasan pengunjung dan jam kegiatan usaha menyebabkan berkurangnya pengunjung hotel dan restoran yang sangat besar. Banyak usaha seperti hotel dan juga restoran yang tutup dikarenakan tidak mampu untuk menutupi biaya operasional.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 10,04%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Besar memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 7,33%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan

instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Jaya

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 6. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	52.599.500.273	58.624.901.408	72.776.854.246	79.460.106.476	75.576.342.966
Total Pendapatan	1.001.681.949.412	827.345.173.924	937.756.732.518	884.800.030.122	925.539.164.321

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2021, penurunan PAD Kabupaten Aceh Jaya terjadi pada Pendapatan Retribusi yang mengalami penurunan sebesar Rp8.628.057.874-, tepatnya pada Retribusi Jasa Umum seperti, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi perizinan dalam mendirikan bangunan.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 8,98%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Jaya memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 7,44%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Jaya memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Selatan

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 7. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Selatan

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	140.875.267.831	152.071.795.580	139.976.611.272	134.381.481.918	132.246.459.929
Total Pendapatan	1.547.172.153.325	1.362.490.892.666	1.453.924.737.412	1.359.677.965.928	1.362.222.315.800

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah, khususnya pada bagian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2019 dana BOS dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Objek Pendapatan Hibah Dana BOS. Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah PAD disebabkan karena terjadinya perlambatan pada pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan terdapat dua objek pajak yang tidak terealisasi yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet, tidak terealisasinya pajak hiburan disebabkan diberlakukannya pembatasan sosial yang melarang kegiatan pengumpulan massa demikian juga realisasi pajak hotel yang mengalami penurunan sebesar 80,51% akibat menurunnya tingkat hunian hotel. Pada tahun 2021, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, disebabkan terkoreksinya laba operasional PT. Bank Aceh Syariah TA 2021 sebagai akibat menurunnya aktifitas perekonomian imbas dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan diatas kita dapat melihat bahwa, dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 11,16%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Selatan memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 9,89%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Selatan memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Singkil

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 8. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	43.441.129.848	45.289.515.136	45.264.588.433	46.166.274.075	52.823.038.447
Total Pendapatan	878.765.795.658	752.386.991.465	897.705.948.880	852.219.517.306	913.854.709.165

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada pos Pendapatan Pajak Daerah, khususnya pada bagian Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya menurun 22,39% atau Rp200.471.005,00, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurun 35,77% atau Rp139.831.772,00, Pajak Air Bawah Tanah menurun 47,81% atau Rp108.582.480,00, Pajak Sarang Burung Walet menurun 26,93% atau Rp12.397.539,00, dan Pajak Hotel menurun 18,50% atau Rp7.223.100,00. Sedangkan Pajak Hiburan hanya dipungut pada saat adanya Pergelaran Pameran HUT Kabupaten yang diadakan di Tempat Terbuka dan

Tahun 2019 ditiadakan pungutan retribusi pada kios-kios yang berada disana. Realisasi Pendapatan pajak kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 mengalami peningkatan 165,93 persen atau sebesar Rp11.151.266.047 dibandingkan perolehan Pajak Daerah Tahun 2020 lalu. Realisasi Pajak Daerah tertinggi berasal dari Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 6,01%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Singkil memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 5,43%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Tamiang

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Tabel 9. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	116.246.212.753	139.261.841.911	128.905.940.324	125.638.090.728	138.639.037.827
Total Pendapatan	1.269.997.967.864	1.163.526.177.300	1.278.611.526.700	1.201.824.622.623	1.241.729.477.576

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada pos Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pada tahun 2020, penurunan Jumlah PAD terjadi dikarenakan adanya penurunan jumlah pada pos Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan dan Lain-lain PAD yang sah. Tahun 2021, PAD Kabupaten Aceh Tamiang pada “Lain-lain PAD Yang Sah” mengalami peningkatan yang terbesar pada pendapatan BLUD sejumlah Rp.79.205.730.730.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 11,96%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 10,56%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Tengah

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 10. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Tengah

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	163.000.739.413	150.818.710.372	170.961.167.591	193.589.829.608	165.060.983.456
Total Pendapatan	1.508.729.337.576	1.262.011.455.705	1.386.138.430.360	1.395.423.721.874	1.329.149.773.145

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada pos Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021, PAD Kabupaten Aceh Tengah tepatnya pada “Lain-lain PAD yang sah” mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebesar Rp.28.510.570.970-, dari tahun 2020 berdasarkan jumlah pendapatan BLUD.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 13,87%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Tengah memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 12,27%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Tenggara

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 11. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	60.053.234.222	80.263.476.272	117.628.924.350	98.346.791.414	81.385.176.053
Total Pendapatan	1.404.037.363.923	1.104.659.776.323	1.346.183.699.419	1.323.614.177.534	1.275.038.840.730

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah. PAD Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2021 mengalami penurunan pada “Lain-lain PAD yang sah” dibandingkan dengan tahun 2020, selisih tersebut terdapat pada Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang sebelumnya pada tahun 2020 sejumlah Rp.66.680.231.579-.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2019 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 8,73%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Tenggara memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 6,9%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Tenggara memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Timur

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 12. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Timur

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	158.492.371.449	169.455.864.158	185.148.022.039	198.202.802.576	122.378.737.965
Total Pendapatan	1.964.377.122.359	1.609.716.135.931	1.939.152.149.064	1.827.172.559.925	1.811.878.762.006

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2020 jumlah PAD Kabupaten Aceh Timur mengalami peningkatan, tetapi walaupun begitu, Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 sebesar Rp897.532.836 mengalami penurunan sebesar Rp18.138.201.983 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp19.035.734.819. PAD Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2021 mengalami penurunan pada “Lain- lain PAD yang sah” dibandingkan dengan tahun 2020, selisih tersebut terdapat pada Pendapatan Dana BOS yang sebelumnya pada tahun 2020 sejumlah Rp. 69.434.804.974-.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 10,84%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Timur memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 9,14%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Aceh Utara

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 13. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Aceh Utara

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	202.091.566.054	231.848.856.926	279.567.720.149	226.828.863.805	178.917.308.912
Total Pendapatan	2.402.604.230.993	2.252.292.515.267	2.606.115.300.596	2.582.874.013.125	2.477.857.489.834

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos Pendapatan Pajak Daerah khususnya pada bagian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.34.662.251.164. Kemudian penurunan juga terjadi pada pos Lain-lain PAD yang sah Pendapatan BLUD sebesar 5.352.463.141. PAD Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan pada “Lain-lain PAD yang sah” dibandingkan dengan tahun 2020, selisih tersebut terdapat pada Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sebelumnya pada tahun 2020 sejumlah Rp.33.751.139.345-.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2019 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 10,72%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Aceh Utara memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 9,08%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Bener Meriah

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 14. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Bener Meriah

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	82.038.407.023	67.961.546.854	86.415.549.452	70.073.507.073	62.891.545.325
Total Pendapatan	1.030.789.241.695	878.692.257.195	1.035.475.070.739	974.751.365.793	1.018.377.405.168

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada beberapa pos, diantaranya adalah; Pendapatan Pajak Daerah, khususnya pada pajak restoran, pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, pajak hiburan. Kemudian penurunan juga terjadi pada

pos Pendapatan Retribusi dan pos Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 PAD Kabupaten Bener Meriah juga mengalami penurunan pada pos “Lain-lain PAD yang sah” dibandingkan dengan tahun 2020, selisih tersebut terdapat pada Pendapatan Klaim Dana Non Kapitasi JKN – Dinas Kesehatan yang sebelumnya pada tahun 2020 sejumlah Rp.11.098.105.013. maka pada tahun berikutnya, pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus mengoptimalkan kembali pendapatan yang bersumber dari “Lain-lain PAD yang Sah”.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan kelima tahun (2017-2021), tahun 2019 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 8,34%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Bener Meriah memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 7,47%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Bener Meriah memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Bireuen

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 15. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Bireuen

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	192.939.858.236	179.476.248.778	156.528.834.490	162.162.621.716	173.287.820.620
Total Pendapatan	2.109.508.338.090	1.753.502.126.161	1.942.346.689.900	1.893.665.166.449	1.975.175.479.608

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan pada beberapa pos, diantaranya adalah pos pendapatan retribusi dan pos lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Bireuen juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pos lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021, jumlah PAD Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan pada pendapatan “Lain-lain PAD yang Sah” yaitu terjadinya peningkatan pendapatan BLU RSUD Dr. Fauziah Bireuen sebesar Rp5.416.525.438-, dibandingkan dengan tahun 2020.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 10,23%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Bireuen memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 8,95%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Bireuen memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Bireuen untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Gayo Lues

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 16. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Gayo Lues

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	60.312.455.602	48.758.464.134	51.415.803.751	58.402.728.094	63.647.025.986
Total Pendapatan	976.610.487.499	860.506.512.575	955.951.451.751	920.676.739.729	866.308.345.510

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos pendapatan retribusi khususnya pada bagian Hal ini disebabkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari klaim BPJS pada RSUD berpindah fasilitas pelayanannya ke Klinik praktek dokter (Pratama), dan Retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami penurunan disebabkan karena perpindahan pajak pagi Tebelang ke pajak terpadu Buntul Tajuk maka PAD Pajak Tebelang tidak dipungut lagi sehingga PAD berkurang dari target yang ditetapkan, serta penurunan realisasi pada jenis-jenis retribusi sebagai berikut : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Retribusi ijin gangguan. Sedangkan untuk tahun selanjutnya, jumlah PAD Kabupaten Gayo Lues terus mengalami peningkatan yang terdiri atas empat jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, peningkatan pendapatan yang signifikan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2021 sebesar Rp.37.111.814.909. di bandingkan pada TA 2020 sebesar Rp.33.867.134.111.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2021 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 7,34%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Gayo Lues memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 6,17%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gayo Lues untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Nagan Raya

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 17. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Nagan Raya

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	74.051.054.126	97.118.515.691	87.625.375.251	109.062.630.923	98.407.306.650
Total Pendapatan	1.138.556.108.950	982.156.185.125	1.125.215.929.047	1.143.988.633.866	1.102.326.495.813

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp11.652.136.009 atau 15,14% dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.940.623.081. Kontribusi terbesar realisasi Lain-Lain PAD yang Sah berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Pendapatan BLUD), Pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebesar 17,37% dari total realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2019. PAD Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan Pendapatan Lain-lain BLUD-LO TA 2021 dari tahun sebelumnya sebesar Rp445.467.799,00 karena pada tahun sebelumnya ada penerimaan dari denda BPJS pada BLUD akibat keterlambatan pembayaran klaim.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 9,88%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Nagan Raya memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 8,52%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Pidie

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Pidie.

Tabel 18. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Pidie

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	267.608.101.034	237.201.958.015	243.230.774.790	214.947.831.017	224.009.999.551
Total Pendapatan	2.162.679.284.868	1.937.580.207.531	2.121.009.904.350	2.058.619.033.986	2.112.611.434.388

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya jumlah penurunan yang signifikan pada pos pendapatan zakat dan lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan zakat, penurunan terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, Zakat merupakan bagian dari Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan se besar Rp29.579.505.212 dari realisasi TA 2017 sebesar Rp213.285.340.005. Pada tahun 2020, penurunan jumlah PAD terjadi dikarenakan adanya penurunan pada setiap pos pendapatan yaitu;

pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. Untuk penurunan pada pos pendapatan retribusi terjadi dikarenakan pada tahun 2020 kondisi masyarakat Kabupaten Pidie mengurangi aktivitas akibat wabah pandemi Covid-19 sehingga berimbas pada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan intensifikasi pungutan retribusi daerah terutama dari segi pelayanan kepada wajib retribusi.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2017 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 12,37%. Jika dirata- ratakan Kabupaten Pidie memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata- rata sebesar 11,42%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Pidie memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pidie untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Pidie Jaya

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 19. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	47.409.466.484	57.432.814.784	68.830.728.478	79.574.101.889	82.373.813.742
Total Pendapatan	1.349.143.355.199	853.789.558.758	1.047.978.654.055	962.513.543.412	946.127.037.543

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2018 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.10.023.348.300, pada tahun 2019 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.11.397.913.694, pada tahun 2020 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.743.373.411, pada tahun 2021 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar 2.799.711.853. penyumbang terbesar dari adanya peningkatan jumlah PAD berturut-turut dari tahun 2017 hingga pada tahun 2021 tersebut berasal dari pendapatan retribusi.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2021 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 8,70%. Jika dirata- ratakan Kabupaten Pidie Jaya memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 6,75%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kabupaten Simeulue

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kabupaten Simeulue.

Tabel 20. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Simeulue

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	61.095.183.851	63.146.021.911	79.466.327.068	96.837.497.099	127.487.366.439
Total Pendapatan	982.103.393.134	827.761.914.218	958.340.366.682	844.509.438.522	839.807.660.088

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2018 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.2.050.838.060, penyumbang terbesar dari adanya peningkatan jumlah PAD pada tahun tersebut adalah pendapatan zakat. Pada tahun 2019 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.16.320.305.157, penyumbang terbesar dari adanya peningkatan jumlah PAD pada tahun tersebut adalah lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.17.371.170.031, penyumbang terbesar dari adanya peningkatan jumlah PAD pada tahun tersebut adalah lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.30.649.869.340, penyumbang terbesar dari adanya peningkatan jumlah PAD pada tahun tersebut adalah lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2021 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 15,18%. Jika dirata-ratakan Kabupaten Simeulue memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 9,75%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kabupaten Simeulue memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Simeulue untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kota Banda Aceh

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kota Banda Aceh.

Tabel 21. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kota Banda Aceh

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	270.170.805.366	246.272.150.484	235.123.074.164	227.747.620.343	224.364.761.635
Total Pendapatan	1.244.415.059.118	1.135.914.599.521	1.215.834.088.158	1.258.996.719.879	1.209.597.173.418

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2018 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.23.898.654.882, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah. Pada

tahun 2019 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.11.149.076.320, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.7.375.453.821, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pada tahun 2021 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.3.382.858.708, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah. Penurunan PAD TA 2021 terdapat pada Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang terdiri dari Jasa Layanan BLUD RSUD Meuraxa dan Jasa Layanan BLUD Pasar.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2017 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 21,71%. Jika dirata-ratakan Kota Banda Aceh memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 19,865%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kota Banda Aceh memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kota Banda Aceh untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kota Langsa

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kota Langsa.

Tabel 22. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kota Langsa

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	120.138.956.032	121.316.713.328	115.244.246.710	126.277.867.970	109.168.077.449
Total Pendapatan	1.014.888.423.313	806.608.245.619	909.788.751.296	861.563.457.580	901.204.921.368

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2019 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.6.072.466.618, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.17.109.790.521, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah. PAD Kota Langsa mengalami penurunan di karenakan Pendapatan BLUD Rumah sakit umum daerah menurun sebesar Rp.13.070.623.673., dibandingkan dengan TA 2020.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 15,04%. Jika dirata-ratakan Kota Langsa memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 13,25%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kota Langsa memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif

yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kota Langsa untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kota Lhokseumawe

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kota Lhokseumawe.

Tabel 23. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kota Lhokseumawe

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	62.986.260.103	65.618.966.777	61.442.558.519	65.875.904.859	61.984.628.376
Total Pendapatan	901.721.200.897	749.405.667.506	864.499.598.942	835.667.970.983	799.161.561.536

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2019 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.4.176.408.258, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan pajak khususnya bagian pajak BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan beberapa pajak lainnya. Penurunan realisasi BPHTB Tahun 2019 dengan Tahun 2018 disebabkan pada Tahun 2018 ada pemasukan BPHTB yang jumlahnya sangat signifikan karena terjadinya jual beli gedung Harun Square. Pada tahun 2021 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.17.109.790.521, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah. PAD Kota Lhokseumawe TA 2021 mengalami penurunan yang bersumber dari Pendapatan Pajak yaitu sebesar Rp.6.161.115.116., pada bagian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penurunan penerimaan Pajak BPHTB tahun 2021 disebabkan kondisi yang bersifat insidentil pada PT Bank BNI yang melakukan pengalihan status Kepemilikan dari BNI Konvensional ke BNI syariah pada Tahun 2020.

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2018 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 8,75%. Jika dirata-ratakan Kota Lhokseumawe memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 7,69%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kota Lhokseumawe memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kota Lhokseumawe untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kota Sabang

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kota Sabang.

Tabel 24. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kota Sabang

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	55.081.057.066	57.188.076.200	59.329.692.603	62.412.228.452	57.778.238.856
Total Pendapatan	646.136.294.980	617.065.184.869	665.850.429.453	659.860.210.909	618.463.738.148

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Penurunan jumlah PAD yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan umum dan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 9,45%. Jika dirata-ratakan Kota Sabang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 9,09%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kota Sabang memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kota Sabang untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

Kota Subulussalam

Berikut tabel yang berisi data nilai total pendapatan dan PAD untuk daerah Kota Subulussalam.

Tabel 25. Jumlah PAD dan Total Pendapatan Kota Subulussalam

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total PAD	56.519.514.115	38.955.598.635	51.810.001.542	56.850.612.680	57.924.002.571
Total Pendapatan	747.574.198.673	563.661.786.542	722.031.629.642	605.538.551.548	647.513.510.622

(Sumber: LKPD 2017-2021, 2023)

Pada tahun 2019 terjadi Penurunan jumlah PAD sebesar Rp.17.563.915.480, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah, kemudian diikuti dengan pos pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan pendapatan zakat. Pendapatan Pajak merupakan faktor meningkatnya PAD Kota Subulussalam TA 2021, peningkatan pendapatan tersebut terdapat pada Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan nilai persentase rasio kemandirian keuangan dari kelima tahun (2017-2021), tahun 2020 merupakan tahun dengan nilai rasio kemandirian keuangan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 9,38%. Jika dirata-ratakan Kota Sabang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata sebesar 7,99%.

Berdasarkan hasil klasifikasi pola hubungan yang diperoleh dari nilai rasio kemandirian keuangan, terlihat bahwa Kota Subulussalam memiliki jumlah PAD dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rentang persentase (0-25%). Artinya kemandirian keuangan daerah Kota Subulussalam d untuk mengakomodir keperluan dan hal biaya terkait terselenggaranya setiap tugas pemerintahan, layanan, dan pengembangan yang tergolong dibawah rata-rata per tahunnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun Anggaran 2017-2021. Dalam penelitian ini, peneliti telah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa kemandirian keuangan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan serta pembangunan masih sangat rendah setiap tahunnya. Pemerintah pusat masih memiliki peran yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan serta pembangunan dibandingkan dengan peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Penelitian ini hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan untuk melakukan analisis PAD serta data laporan keuangan yang digunakan hanya dari tahun 2017-2021. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lainnya dalam melakukan analisis PAD, seperti rasio derajat ketergantungan, dan rasio derajat desentralisasi fiskal, serta menambah jumlah periode pengamatan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Aceh. (2021). *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2019*. In *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2019* (Issue 04).
- Diskominfo. (2022). *Laporan Kinerja 2022*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. *The Winners*, 16(2), 152. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Gujarati, J. (2012). A comprehensive induction system: A key to the retention of highly qualified teachers. *Educational Forum*, 76(2), 218–223.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Maemunah. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Andi.
- Mariani, L. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah*. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).

- Oktalina, G. (2020). Analysis of Regional Financial Performance through the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio in the District South Bangka. *International Journal of Finance Research*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.47747/financeinvestmentderivative.v1i2.99>
- Rahayu, R. P. (2016). *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan*. Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 1(01). <https://doi.org/10.36467/makro.2016.01.01.05>
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016*. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (A Nur Hani)*. Salemba Empat.
- Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.